

Media Online	Rakyat Sulsel
Tanggal	Kamis, 15 Mei 2025
Wilayah	Kabupaten Bulukumba



Pansus LKPJ DPRD Bulukumba Soroti Mangkraknya Pembangunan 7 RKB di SMPN 1



BULUKUMBA, RAKYATSULSEL – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bulukumba menyoroti proyek pembangunan tujuh ruang kelas baru (RKB) di SMP Negeri 1 Bulukumba yang hingga kini belum rampung. Pembangunan RKB dua lantai yang menelan anggaran sebesar Rp1,4 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut dinilai tidak bisa dimanfaatkan karena belum selesai secara fisik. Proyek tersebut belum memiliki dinding dan atap secara menyeluruh. Ketua Pansus LKPJ DPRD Bulukumba, HA Pangerang Hakim (Fraksi PPP), menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan. “Hasilnya jelas, bangunan belum selesai. Dinding belum terpasang, sebagian belum beratap, dan tentu belum layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” kata Pangerang, Kamis (15/5/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Kepala SMP Negeri 1 Bulukumba menyampaikan bahwa beberapa ruang kelas yang ada sudah tidak layak pakai, sehingga keberadaan RKB sangat dibutuhkan untuk mendukung proses belajar-mengajar. Anggota Pansus dari Fraksi PKS, Rizal Syarif, ST, turut menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan arahan Bupati Bulukumba yang menekankan agar setiap pembangunan infrastruktur diselesaikan dengan tuntas. “Kalau memang anggaran Rp1,4 miliar tidak cukup untuk membangun tujuh ruang kelas dua lantai, seharusnya dibangun satu lantai saja, tapi selesai dan bisa dimanfaatkan,” ujar Rizal. Ia juga menyoroti peran konsultan perencanaan proyek. Menurutnya, konsultan semestinya memberikan masukan teknis kepada Dinas Pendidikan terkait batas kemampuan anggaran. “Ini jelas masalah perencanaan yang kurang matang,” tegasnya. Lebih lanjut, Ketua Pansus Pangerang Hakim mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjadwalkan rapat klarifikasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, serta konsultan perencanaan pada Kamis (15/5/2025). Namun, hingga rapat dijadwalkan, para pihak terkait belum hadir. “Apa yang dilakukan Pansus merupakan bagian dari tugas pengawasan DPRD, termasuk memastikan pembangunan RKB berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat,” tutup Pangerang. (Sal)